

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pembangunan ekonomi ialah segala proses multidimensional yang memiliki cakupan dalam berbagai perubahan struktur sosial yang mendasar. Di samping itu, diharapkan terus mengejar akselerasi pertumbuhan ekonomi, penanganan ketimpangan pendapatan, serta meminimalisir kemiskinan ataupun perubahan dari keseluruhan masyarakat dalam menuju kondisi yang lebih baik. Sedangkan pembangunan ekonomi daerah merupakan proses yang dilakukan pemerintah daerah dan masyarakat dalam menciptakan lapangan kerja baru dan mempercepat kegiatan ekonomi dalam mengelola sumber daya yang ada dengan membentuk pola kemitraan. Pembangunan ekonomi dilihat dari perubahan pertumbuhan ekonomi dari setiap daerah yang dicapai melalui kebijakan pemerintah sehingga dapat mendorong laju pertumbuhan ekonomi.

Pertumbuhan ekonomi dapat diartikan sebagai suatu kegiatan dalam perekonomian yang menyebabkan barang dan jasa yang telah di produksi oleh masyarakat dapat bertambah dan menyebabkan meningkatnya kemakmuran masyarakat (Sukirno, 2019a). Dengan adanya pertumbuhan ekonomi yang tinggi tentunya terdapat pemerataan pendapatan dan stabilitas ekonomi yang merupakan sasaran kebijakan suatu negara. Pertumbuhan ekonomi dapat dikaitkan dengan kesejahteraan masyarakat yang mana dapat dilihat apabila semakin tinggi pertumbuhan ekonomi suatu negara maka akan semakin tinggi pula kemampuan suatu negara dalam memenuhi kebutuhan masyarakat yang nantinya akan berdampak langsung pada kesejahteraan masyarakat dalam suatu daerah tersebut.

Pertumbuhan ekonomi tentunya tidak terlepas dari peranan pelaku ekonomi yaitu pemerintah yang berperan sebagai instrumen kebijakan publik dan fiskal, swasta yang berperan dalam mengembangkan investasi dan masyarakat berperan sebagai input faktor produksi serta jaminan terciptanya pasar dalam suatu perekonomian.

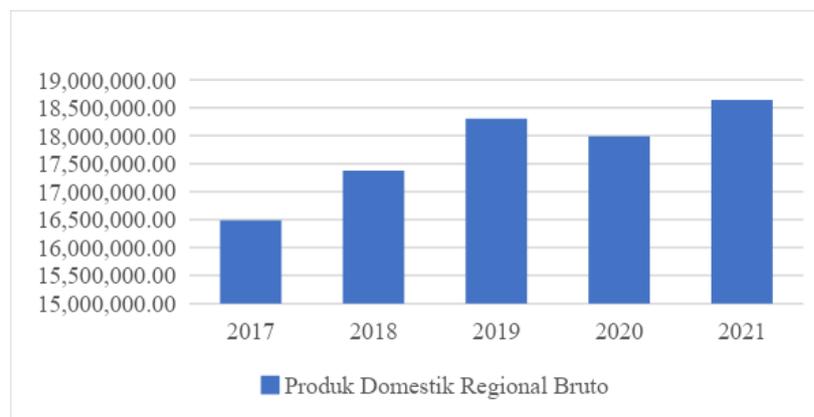
Salah satu indikator yang digunakan untuk melihat pertumbuhan ekonomi daerah yaitu pendapatan nasional, sedangkan indikator yang sering digunakan suatu negara yaitu Produk Domestik Bruto dan untuk wilayah menggunakan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), yang mana didalamnya terdapat kegiatan perekonomian yang dilaksanakan dan dicapai oleh penduduk selama periode tertentu. Dalam hal tersebut tentunya pertumbuhan ekonomi indikator penting guna menilai kinerja suatu perekonomian terutama dalam melakukan analisis terkait pembangunan ekonomi yang telah dilakukan oleh suatu negara atau daerah. Dalam upaya mendukung pelaksanaan pembangunan nasional tentunya pemerintah dapat memberikan kesempatan dalam menyelenggarakan otonomi daerah (Talangamin et al., 2019). Melalui otonomi daerah, pemerintah daerah memiliki wewenang dalam menggali pendapatan dan pengalokasian secara mandiri guna menetapkan prioritas pembangunan yang diharapkan nantinya dapat menjadikan pembangunan yang merata sesuai dengan kebutuhan daerah dalam mengembangkan potensi yang ada didalamnya.

Dalam Provinsi Jawa Timur terdapat Kabupaten Nganjuk yang mana Kabupaten tersebut dikenal sebagai daerah yang memiliki potensi dalam sektor pertanian yang di dukung dengan lahan yang cukup luas dan sumber daya alam yang sangat melimpah. Di samping itu, Kabupaten Nganjuk memiliki beberapa sektor yang dapat menunjang Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) seperti

halnya sektor pertanian Kehutanan, dan Perikanan, sektor industri pengolahan, sektor konstruksi, dan sektor perdagangan besar dan eceran.

Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistika Kabupaten Nganjuk bahwa Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) mengalami fluktuatif. berikut data Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kabupaten Nganjuk :

Gambar 1. 1 Produk Domestik Regional Bruto Kabupaten Nganjuk



Berdasarkan Gambar 1.1 dapat dilihat bahwa Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kabupaten Nganjuk selama 5 tahun terakhir cenderung mengalami fluktuatif. Pada tahun 2017-2019 mengalami kenaikan dari Rp. 16.485.623,70 menjadi Rp. 18.304.204,58 Namun, pada tahun 2020 mengalami penurunan yang cukup drastis diakibatkan pandemi *Covid-19* sebesar Rp. 17.990.364,53. Kemudian, pada tahun 2021 mengalami kenaikan kembali menjadi Rp. 18.640.684,56. Dengan adanya pandemi *Covid-19* mengakibatkan sebagian alokasi dana yang digunakan pembangunan dianggap kurang maksimal sehingga dialihkan dalam penanganan *Covid-19*. Sehingga dana yang digunakan dalam pelaksanaan program-program sangat kurang yang berdampak langsung pada kontribusi

terhadap pertumbuhan ekonomi yang kecil dari keseluruhan sektor baik dalam sektor basis maupun non basis yang ada di Kabupaten Nganjuk itu sendiri.

Dalam kegiatan perekonomian tentunya sangat bermacam-macam yang dapat mendorong suatu daerah dalam mengembangkan potensi perekonomian yang dimilikinya. Oleh karena itu, pembangunan daerah harus dilaksanakan secara selaras dan diarahkan yang nantinya pembangunan di suatu daerah dapat berjalan dengan baik yang selanjutnya pemerintah daerah dapat bersaing dalam meningkatkan pembangunan yang telah dilakukan dan juga dapat menyusun strategi dalam meningkatkan pendapatan asli daerah.

Pendapatan asli daerah merupakan pendapatan yang diperoleh suatu daerah yang dipungut atas dasar peraturan daerah yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Pendapatan asli daerah memiliki tujuan dalam memberikan wewenang terhadap pemerintah daerah dalam memberikan dana sebagai upaya pelaksanaan otonomi daerah yang sesuai dengan perwujudan desentralisasi. Desentralisasi fiskal disini merupakan kewenangan daerah dalam memanfaatkan sumber keuangannya sendiri yang didukung dengan perimbangan keuangan dari pusat maupun daerah. Dalam hal tersebut, pemerintah dapat memindahkan proses dalam pengambilan keputusan pada tingkat yang lebih dekat dengan masyarakat dikarenakan hasil dari program yang telah disusun dapat dirasakan langsung oleh masyarakat. kebijakan otonomi daerah dan desentralisasi fiskal di level daerah disini memiliki tujuan guna memberikan pelayanan yang baik kepada masyarakat. Menurut paparan UU No. 23 Tahun 2014 pasal 285 menyatakan bahwa PAD bersumber dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah. PAD dipandang

sebagai alternatif sumber pendanaan daerah yang dibutuhkan oleh daerah dalam pengeluaran untuk melaksanakan pemerintahan dan pembangunan yang dapat meminimalkan ketergantungan daerah terhadap subsidi dari pemerintahan pusat (Ferdiansyah et al., 2018).

Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistika Kabupaten Nganjuk bahwa realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) mengalami peningkatan. berikut data Pendapatan Asli Daerah Kabupatn Nganjuk :

Gambar 1. 2 Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Nganjuk



Berdasarkan gambar grafik diatas menunjukkan bahwa Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Nganjuk selama 5 tahun terakhir mengalami peningkatan di setiap tahunnya. Pada tahun 2017-2021 Pendapatan Asli Daerah mengalami peningkatan dari Rp. 332.495.541,85 hingga Rp. 476.323.170,94. Hal tersebut dapat dikatakan bahwa pemerintah daerah Kabupaten Nganjuk telah memberikan upaya ataupun usaha yang terbaik dalam mendorong penerimaannya yang mana juga dapat mengimbangi dari belanja langsung pemerintah yang tinggi serta dapat menunjang proses pertumbuhan ekonomi yang lebih baik.

Dana perimbangan merupakan dana yang berasal dari APBN yang dialokasikan kepada daerah guna mendanai segala kebutuhan daerah dalam rangka

pelaksanaan desentralisasi (Manek & Badrudin, 2017). Selain itu, dana perimbangan ini digunakan untuk membantu daerah dalam mendanai kewenangannya dan juga bertujuan untuk mengurangi ketimpangan sumber dari pendanaan diantara pemerintah pusat dan daerah serta antar pemerintah daerah. Dana perimbangan terdiri atas Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), dan Dana Bagi Hasil (DBH). Dana Alokasi Umum (DAU) memiliki prinsip berkeadilan yang menyatakan bahwa seluruh warga negara ataupun daerah berhak untuk mendapatkan pelayanan yang maksimal seperti halnya pendidikan dan kesehatan pada standart minimum tertentu. kemudian, Dana Alokasi Khusus (DAK) memiliki tujuan untuk membiayai berbagai program yang telah disusun daerah yang merupakan suatu prioritas dalam mendorong upaya pencapaian standar pelayanan minimum pada pelayanan public. Dan Dana Bagi Hasil (DBH) memiliki tujuan untuk menyeimbangkan antara pembangunan nasional dengan pembangunan daerah yang dalam proses pelaksanaannya sekaligus untuk mengurangi ketimpangan antara daerah penghasil dan daerah bukan penghasil sumber daya alam. Menurut paparan UU No.33 Tahun 2004 Pasal 33 pembagiannya dilakukan atas dasar prinsip *by origin*, yang dimana penyaluran DBH berdasarkan realisasi penerimaan tahun anggaran berjalan.

Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistika Kabupaten Nganjuk bahwa Dana Perimbangan mengalami flukatuatif. berikut data Dana Perimbangan Kabupatn Nganjuk :

Gambar 1. 3 Dana Perimbangan Kabupaten Nganjuk

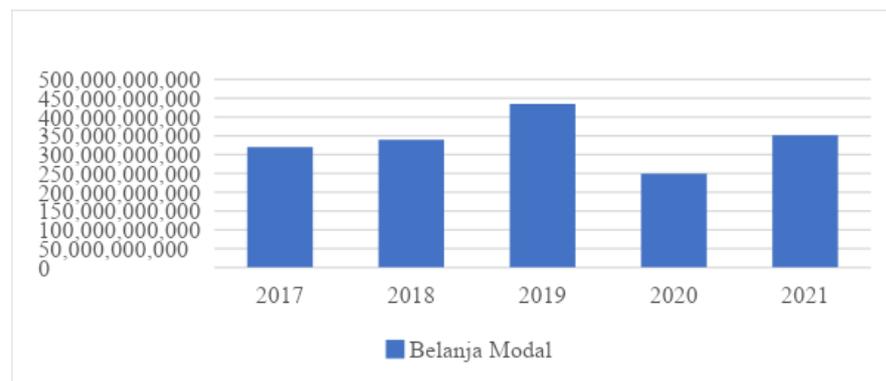


Berdasarkan gambar grafik diatas menunjukkan bahwa Dana Perimbangan Kabupaten Nganjuk selama 5 tahun terakhir mengalami flukatif di setiap tahunnya. Pada tahun 2017-2019 dana perimbangan mengalami peningkatan dari Rp. 1.503.523.174.920 hingga Rp. 1.556.827.334.981. kemudian, pada tahun 2020 mengalami penurunan sebesar Rp. 1.441.047.387.801 dikarenakan adanya pandemi Covid-19. Kemudian, pada tahun 2021 mengalami peningkatan kembali sebesar Rp. 1.486.616.453.650.

Belanja modal merupakan salah satu pengeluaran anggaran pada sektor publik untuk memperoleh asset tetap dan aset lainnya yang dapat memberikan suatu manfaat lebih dalam satu periode yang bisa digunakan kegiatan pemerintahan. Belanja modal menurut Standart Akuntansi Pemerintah terdiri atas belanja modal tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi dan jaringan, dan belanja modal lainnya. Dalam hal tersebut, belanja modal dinilai sangat penting yang berdampak langsung pada masyarakat dalam pengadaan infrastruktur yang dapat menyentuh kegiatan masyarakat sehingga dapat mempengaruhi pertumbuhan ekonomi.

Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistika Kabupaten Nganjuk bahwa realisasi Belanja Modal mengalami peningkatan. berikut data Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Nganjuk :

Gambar 1. 4 Belanja Modal Kabupaten Nganjuk



Berdasarkan gambar grafik diatas menunjukkan bahwa belanja modal Kabupaten Nganjuk selama 5 tahun terakhir mengalami flukatif di setiap tahunnya. Pada tahun 2017-2019 dana perimbangan mengalami peningkatan dari Rp. 319.990.242.921 hingga Rp. 435.247.383.922. kemudian, pada tahun 2020 mengalami penurunan sebesar Rp. 249.630.540.424 dikarenakan adanya pandemi Covid-19. Kemudian, pada tahun 2021 mengalami peningkatan kembali sebesar Rp. 351.676.609.668.

Berdasarkan uraian penjelasan diatas, maka peneliti tertarik untuk menganalisis mengenai **“Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan, dan Belanja Modal Terhadap Produk Domestik Regional Bruto di Kabupaten Nganjuk”**.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut :

1. Apakah ada pengaruh antara pendapatan asli daerah dengan Produk Domestik Regional Bruto di Kabupaten Nganjuk?
2. Apakah ada pengaruh antara dana perimbangan dengan Produk Domestik Regional Bruto di Kabupaten Nganjuk?
3. Apakah ada pengaruh antara belanja modal dengan Produk Domestik Regional Bruto di Kabupaten Nganjuk?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah, maka tujuan utama dalam penelitian ini sebagai berikut :

1. Mengetahui apakah ada pengaruh antara pendapatan asli daerah dengan Produk Domestik Regional Bruto di Kabupaten Nganjuk.
2. Mengetahui apakah ada pengaruh antara dana perimbangan dengan Produk Domestik Regional Bruto di Kabupaten Nganjuk.
3. Mengetahui apakah ada pengaruh belanja modal dengan Produk Domestik Regional Bruto di Kabupaten Nganjuk.

1.4 Ruang Lingkup

Adapun ruang lingkup penelitian ini sebagai berikut :

1. Penelitian ini mencakup series data selama periode 2012 – 2021 pada Kabupaten Nganjuk.

2. Penelitian ini menggunakan Produk Domestik Regional Bruto sebagai variabel dependen sedangkan untuk pendapatan asli daerah, dana perimbangan, dan belanja modal sebagai variabel independen.

1.5 Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut :

1. Bagi Peneliti

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan tambahan ilmu serta wawasan khususnya dalam bidang ekonomi terlebih dalam melakukan penulisan karya ilmiah.

2. Bagi Instansi

Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan bahan acuan dan tambahan informasi dalam menentukan atau melanjutkan program-program yang diberikan oleh pemerintah yang dapat menunjang Produk Domestik Regional Bruto.

3. Bagi Pihak Lain

Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai bahan acuan bagi peneliti selanjutnya sebagai bahan studi dan informasi terkait Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan dan Belanja Modal Terhadap Produk Domestik Regional Bruto di Kabupaten Nganjuk.